

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA TAMBU, KECAMATAN BALAESANG, KABUPATEN DONGGALA

Hasmita Sari¹⁾, Muhammad Din²⁾, Faruq Lamusa³⁾

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tadulako
Email: hasmitasari023@gmail.com

² Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tadulako
Email: didi.kaili83@gmail.com

³ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tadulako
Email: lamusafaruq@gmail.com

Abstract

Village financial management training activities are carried out as a form of service activities held in Tambu Village, Balaesang District, Donggala Regency. Village financial management training is expected to be able to become a new source or additional reference for local communities, especially village apparatus (apparatus) in terms of planning, implementation, administration, reporting and accountability for the implementation of transparent village financial management and in accordance with applicable regulations. The urgency of village financial management training is the maximum ignorance of village officials in managing to accountability, so that village financial management training as a form of service is carried out with the aim of maximizing the knowledge of village officials in management and financial accountability can be carried out optimally by Tambu Village officials, Balaesang District, Donggala Regency. In its implementation, this training activity presented resource persons from a team of Tadulako University lecturers. This service activity is designed in the form of training which is carried out by the method of lectures and discussions between resource persons and village officials. Through community service activities carried out in the form of training, it is hoped that it can increase the knowledge, insight, and skills of the local community and village apparatus in Tambu Village in carrying out financial management to village financial reporting that is transparent, accountable, participatory, effective, and efficient.

Keywords: *Devotion, Training, Financial Management.*

Abstrak

Kegiatan pelatihan pengelolaan keuangan desa dilaksanakan sebagai salah satu bentuk kegiatan pengabdian yang dilaksanakan di Desa Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala. Pelatihan pengelolaan keuangan desa diharapkan mampu menjadi sumber baru atau referensi tambahan bagi masyarakat setempat khususnya aparatur (aparatur) desa dalam hal perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Urgensi pelatihan pengelolaan keuangan desa adalah ketidaktahuan perangkat desa yang maksimal dalam mengelola hingga pertanggungjawaban, sehingga pelatihan pengelolaan keuangan desa sebagai bentuk pengabdian dilakukan dengan tujuan untuk memaksimalkan pengetahuan perangkat desa dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dapat dilakukan. dilakukan secara maksimal oleh perangkat Desa Tambu, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pelatihan ini menghadirkan narasumber dari tim dosen Universitas Tadulako. Kegiatan pengabdian ini dirancang dalam bentuk pelatihan yang dilaksanakan dengan metode ceramah dan diskusi antara narasumber dengan perangkat desa.

Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dalam bentuk pelatihan, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan keterampilan masyarakat setempat dan perangkat desa di Desa Tambu dalam melakukan pengelolaan keuangan hingga pelaporan keuangan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, dan efisien.

Kata kunci: Pengabdian, Pelatihan, Pengelolaan Keuangan

PENDAHULUAN

Desa merupakan lembaga pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan mengembangkan potensi masyarakat desa. Salah satu dukungan yang diberikan pemerintah dalam mengembangkan potensi masyarakat desa dan menyesuaikan dengan kebutuhan desa, adalah melalui UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Junaidi, 2020). Desa dipandang masih jauh tertinggal dibandingkan dengan kota baik dari segi ekonomi, kesejahteraan, pendidikan dan fasilitas-fasilitas lainnya. Pemerintah banyak melakukan program untuk mendorong percepatan pembangunan pedesaan, tetapi hasilnya belum signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Salah satu faktor penyebab kegagalan pembangunan desa adanya besarnya campur tangan pemerintah sehingga berdampak pada terhambatnya kreativitas serta inovasi masyarakat desa dalam pengelolaan dan perekonomian desa.

Sekarang ini, kebijakan pembangunan cenderung berpusat di wilayah kota yang mengakibatkan terjadinya ketimpangan antara kota dan desa. Pertumbuhan ekonomi di wilayah kota menyebabkan magnet yang luar biasa bagi masyarakat desa untuk mencari penghidupan yang lebih baik di kota. Tenaga kerja potensial desa yang dirasa lebih baik. Akibatnya selain kekurangan sumber dana, desa juga kekurangan sumber daya manusia. Kondisi tersebut dapat memicu terhadap keterlambatan pembangunan sehingga desa identik dengan infrastruktur yang jelek, sarana yang minim, kemiskinan dan berbagai permasalahan lainnya.

Dalam rangka menangani permasalahan tersebut pemerintah mengeluarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang menyebutkan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang di peruntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta dengan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang diadakannya kegiatan pelatihan pengelolaan keuangan desa yaitu kurangnya pengetahuan perangkat atau aparatur desa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari APBN serta dengan pelaporan keuangan secara maksimal sebagai bentuk transparansi pemerintah desa sesuai dengan regulasi yang berlaku. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat membantu program kerja Pemerintah dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan perangkat desa serta membantu mereka dalam memahami tata cara pengelolaan keuangan desa yang sesuai standar akuntansi, sehingga nantinya mereka memiliki keterampilan yang memadai dalam melakukan pengelolaan keuangan desa sesuai standar akuntansi. Selain itu, kegiatan ini juga merupakan salah satu bentuk kontribusi civitas akademik Universitas Tadulako dalam hal transfer ilmu dan berbagi pengetahuan kepada masyarakat, sehingga salah satu elemen Catur Dharma Perguruan Tinggi yakni Pengabdian kepada Masyarakat dapat terpenuhi.

Adapun lokasi pengabdian yang dipilih dalam kegiatan pengabdian ini adalah Desa Tambu, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala yang lokasinya cukup strategis sehingga berpotensi untuk dijadikan sebagai desa percontohan bagi desa-desa lainnya dikecamatan yang sama dalam pengelolaan keuangan desa.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini secara umum bertujuan untuk Memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat desa terutama perangkat Desa Tambu, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala mengenai pengelolaan keuangan desa yang sesuai standar akuntansi. Sedangkan secara khusus, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama perangkat desa tentang siklus pengelolaan keuangan desa yang sesuai standar akuntansi.
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama perangkat desa mengenai proses perencanaan, penyusunan, pelaporan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa.
3. Memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama perangkat desa mengenai dokumen-dokumen yang digunakan dalam pengelolaan keuangan desa sesuai standar akuntansi.

Adapun target pelaksanaan pengabdian masyarakat pada Program bina desa ini diarahkan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat desa khususnya para perangkat desa di Desa Tambu, Kecamatan Balaesang mengenai pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, efektif dan efisien.

Jadi, setelah mendapatkan pelatihan tentang pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan standar akuntansi, diharapkan masyarakat Desa Tambu memiliki keterampilan yang semakin optimal dalam melaksanakan pengelolaan keuangan, serta dapat meningkatkan kinerjanya dalam pengelolaan keuangan desa.

IDENTIFIKASI MASALAH

Adapun masalah yang terjadi yaitu:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terutama perangkat desa tentang siklus pengelolaan keuangan desa.
2. Kurangnya pemahaman masyarakat terutama perangkat desa mengenai proses perencanaan, penyusunan, pelaporan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan pada kegiatan ini yaitu mengadakan sosialisasi dan pelatihan. Adapun persiapan yang dilakukan yaitu:

- Materi pelatihan; Kegiatan persiapan materi dilakukan oleh tim pelaksana melalui rapat koordinasi. Pemaparan materi terkait pentingnya penyusunan laporan keuangan Secara sistematis kepada aparatur desa di Desa Tambu, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala.
- Pelaksanaan Pelatihan. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pelatihan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah, tutorial dan diskusi. Yang menjadi narasumber/pemateri dalam kegiatan pelatihan ini yaitu Dosen Universitas Tadulako yang tergabung dalam tim MBKM.
- Evaluasi kegiatan. Evaluasi dilaksanakan setelah kegiatan pelatihan berakhir. Kegiatan evaluasi dilakukan melalui diskusi dan tanya jawab antara tim pelaksana dengan masyarakat peserta, dalam hal ini adalah para Perangkat Desa. Dengan melakukan kegiatan evaluasi ini, tim pelaksana pengabdian dapat mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan program pengabdian yang telah dilakukan, apa saja kekurangan yang perlu diperbaiki, serta apa saja masukan-masukan dari masyarakat yang perlu ditanggapi dan ditindaklanjuti.
- Pelaporan. Adapun tahap akhir dari pelaksanaan kegiatan Bina Desa kepada masyarakat adalah penyusunan laporan pengabdian sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilakukan. Laporan pengabdian ini disusun berdasarkan pelaksanaan kegiatan pengabdian yang telah dilakukan dengan berpedoman pada panduan penyusunan laporan pengabdian yang

ditetapkan oleh pihak Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako. Pada tahap pelaporan ini juga dipersiapkan naskah artikel hasil pengabdian untuk diterbitkan pada Jurnal Pengabdian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Defenisi keuangan desa sebagaimana disebutkan dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntable, partisipasi, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dalam satu tahun anggaran antara lain tercantum dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa). Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa. APBDesa terdiri atas: pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa.

Untuk memaksimalkan dalam pengelolaan keuangan desa kami mengadakan sosialisasi pelatihan pengelolaan keuangan desa. Seperti yang kami telah ketahui bahwa Desa Tambu menggunakan permendagri No. 20 Tahun 2018. Berikut data sistem pengelolaan keuangan Desa Tambu.

a. Perencanaan

Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa dimulai dari Penyusunan Rancangan APBD Desa berdasarkan RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa) melalui sekretaris desa dan dibantu perangkat desa lainnya setelah itu di koordinasikan kepada kepala desa terkait rancangan APBD Desa yang nantinya akan di bawa dalam musyawarah desa bersama BPD yakni yang sudah juga termuat PERDES rancangan APBDes yang terbagi dalam lima (5) Bidang yaitu Bidang Pemerintahan, Bidang Pembangunan, Bidang Pembinaan, Bidang Pemberdayaan dan Bidang Penanggulangan Bencana untuk di musyawarahkan guna mencari kesepakatan sesuai hasil musyawarah desa yang diselenggarakan. Selanjutnya dalam perjalanan biasanya terjadi perubahan APBD Desa yang tahapanya sama seperti APBD Desa Awal jika terjadi perubahan Kegiatan yang di bebaskan dalam APBD Desa atau adanya Sisa Pembelanjaan.



Gambar 1. Siklus Perencanaan Pembangunan

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan Pengelolaan keuangan desa Pemerintah desa menyiapkan berupa rekening Desa dan Dokumen dalam pengelolaan keuangan. Kepala desa menugaskan Kaur Kasi selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran menyusun DPA , dalam dokumen DPA yang dimaksud berupa Rencana Anggaran Kegiatan Desa (RAKD) , Rencana Kerja Kegiatan Desa (RKKD) dan Rencana Anggaran Biaya Desa (RAB) sebelum terbitnya Perdes Tentang APBD Desa dan Perkades Tentang Penjabaran APBD Desa. Setelah itu akan dilakukan verifikasi oleh sekretaris desa dan kemudian di sahkan oleh kepala desa setelah di diverifikasi oleh sekretaris desa. Dalam terjadi perubahan DPA maka Kaur dan Kasi menyusun kembali format DPA Perubahan.

c. Penatausahaan

Dalam penatausahaan pengelolaan keuangan desa, Kaur Keuangan sebagai pelaksana unsur bendahara desa melakukan penatausahaan keuangan desa dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Pencatatan yang di maksud dalam buku kas umum di tutup setiap akhir bulan.

Bendahara desa wajib membuat Buku Pembantu Kas Umum guna memonitoring arus jalanya keuangan yaitu :

- 1) Buku Pembantu Bank yaitu buku mencatat penerimaan dan pengeluaran dari rekening desa. Di mana penerimaa dana ini melalui transferan pemerintah pusat dan daerah.
- 2) Buku Pembantu Pajak, yaitu buku mencatat atas pemotongan pajak dari pembelanjaan atau pembayaran.
- 3) Buku Pembantu Panjar, yaitu buku mencatat pengeluaran atas uang panjar yang diberikan.
- 4) Buku Pembantu Kas Tunai, yaitu buku mencatat pembayaran tunai yang sudah di terpotong pajak atas hasil pembelanjaan.

Selanjutnya setiap pengeluaran atas beban APBD Desa dilakukan secara swakelola baik dalam pengadaan barang dan jasa atau belanja pegawai kemudian harus berdasarkan dokumen DPA dan di sertakan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) oleh dari Pelaksana Kegiatan /PPKD. Setiap pengajuan harus di lakukan verifikasi terlebih dahulu dengan melampirkan dokumen RPD (Rencana Penggunaan Dana) dan setelah itu dibayarkan oleh Bendahara Desa di sertai dengan kwitansi pengeluaran yang di tanda tangani oleh penerima.

d. Pelaporan

Dalam pelaksanaan Pelaporan Keuangan Desa, Kepala Desa melaporkan kepada pemerintah yakni Bupati melalui camat. Adapun laporan yang sampaikan berupa laporan pelaksanaan APBDes dan Laporan Realisasi Kegiatan yang telah dilaksanakan atas pengeluaran APBDes, Setelah itu Bupati akan menyampaikan hasil laporan kepada kementerian yang terkait.

e. Pertanggung Jawaban

Dalam pelaksanaan Pertanggung Jawaban pengelolaan keuangan desa, Pemerintah desa melalui kepala desa menyampaikan Laporan berupa ;

1. Laporan Keuangan Desa dalam bentuk Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggung Jawaban,
2. Laporan Akhir Tahun dilaksanakan setiap akhir tahun paling lambat 3 bulan sebelum di tetapkan peraturan anggaran sebelumnya,
3. Laporan Keuangan Desa kepada masyarakat melalui musyawarah BPD, media elektronik dan media lainnya.

Selanjutnya Bupati Melakukan monitoring atas hasil dari laporan keuangan desa yang disampaikan oleh kepala desa.

Pengabdian masyarakat dilakukan di Desa Tambu, sesuai dengan tugas dan kewajiban dari Perguruan Tinggi untuk mengaplikasikan pengetahuan bagi masyarakat yang membutuhkan serta mendukung pengabdian pada masyarakat sesuai dengan tri dharma Perguruan Tinggi.

Pelaksanaan kegiatan ini setelah melakukan beberapa kali koordinasi dengan pihak Desa Tambu tentang materi dan peserta yang menjadi target pelatihan, waktu pelaksanaan kegiatan serta tempat yang layak.

Pelatihan

Pelaksanaan pelatihan pengelolaan keuangan desa diadakan di Aula Kantor Desa Tambu pada tanggal 22 Desember 2022. Pada jam 08.30 sampai dengan 12.30, yang diikuti oleh Aparat Desa, pengurus BUMDes, serta beberapa masyarakat Desa Tambu.

Narasumber dalam kegiatan pelatihan ini adalah dosen UNTAD Bapak Dr. Muhammad Din, SE., M.Si., AK., CA selaku dosen pembimbing lapangan (DPL) Desa Tambu. Acara pertama diawali dengan registrasi dan pembukaan.

Selanjutnya, dilanjutkan dengan pemberian materi dengan topik pengelolaan keuangan desa. Materi ini membahas tentang pentingnya pengelolaan keuangan desa untuk pelaporan pertanggungjawaban.

Pemberian materi kepada peserta ini dimaksud agar peserta lebih mudah mengetahui dan memahami materi sehingga diharapkan dapat menjadi pedoman bagi peserta untuk mengajukan pertanyaan maupun diskusi yang proaktif pada saat kegiatan berlangsung.

Penyampaian materi oleh tim pengabdian dilakukan dengan sistem diskusi. Setelah seluruh materi disampaikan, dilanjutkan dengan diskusi terbuka dan berbagi pengalaman dengan para peserta. Penyampaian materi dilakukan dengan bahasa yang mudah dipahami. Untuk kelancaran, kenyamanan dan ketertiban penyelenggaraan pelatihan maupun diskusi yang berlangsung, maka strategi yang dilakukan adalah dengan melakukan dialog interaktif pada setiap materi yang disampaikan.

Tahap pengamatan secara mendalam dan komprehensif (monitoring) dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan terhadap para peserta merupakan tolok ukur untuk mengetahui capaian atau terdapatnya peningkatan pengetahuan, pemahaman dan perilaku (kompetensi) peserta.

Kegiatan monitoring partisipasi peserta dilihat sejak dimulainya sosialisasi pelatihan sampai pada penutupan pelatihan. Dalam tahap ini, setiap materi yang disampaikan oleh tim pengabdian mendapat respon aktif dari beberapa peserta dengan perhatian yang optimal. Begitu pula pada alokasi waktu untuk diskusi, keaktifan para peserta juga dimonitoring, yang mana sebagian peserta sangat aktif mengajukan pertanyaan sesuai dengan masalah yang dihadapinya dalam mengelola keuangan desa dan cukup relevan dengan materi yang disampaikan atau masih terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Berbagai pertanyaan yang diajukan peserta, narasumber berupaya memberikan jawaban dengan memberikan contoh dalam mengatasi setiap masalah yang sudah dialami dan sedang dihadapi dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta.



Gambar 2. Pemberian Materi Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Hasil yang dicapai

Adapun hasil kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Pengabdian di Desa Tambu dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Program pengabdian kepada masyarakat telah terlaksana sesuai dengan yang direncanakan, serta dihadiri oleh masyarakat desa, khususnya perangkat desa dan perwakilan BPD Desa Tambu. Adapun langkah-langkah pelaksanaan pelatihan pengelolaan keuangan desa di Desa Tambu, Kecamatan Balaesang dapat dijabarkan sebagai berikut.

Langkah Pertama, Peserta pengabdian diberikan penjelasan mengenai UU dan Peraturan Pemerintah yang terbaru terkait standar pengelolaan keuangan desa.

Langkah Kedua, Peserta pengabdian diberikan penjelasan dan pemahaman mengenai azas-azas pengelolaan keuangan desa yang sesuai standar akuntansi.

Langkah Ketiga, Peserta pengabdian diberikan penjelasan dan pemahaman mengenai tahapan-tahapan / siklus dalam pengelolaan keuangan desa yang sesuai standar akuntansi.

Langkah Keempat, Peserta pengabdian diberikan penjelasan dan pemahaman mengenai proses perencanaan, penyusunan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa.

Langkah Kelima, Peserta pengabdian diberi pelatihan mengenai topik yang telah dijelaskan dengan dipandu oleh narasumber serta dibantu oleh mahasiswa Bina Desa.

Langkah Keenam, Peserta pengabdian diberi kesempatan untuk berdiskusi dan menyampaikan pertanyaan kepada tim pelaksana pengabdian terkait pelatihan yang telah dilaksanakan.

2. Materi pelatihan yang disampaikan oleh narasumber sudah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh tim pelaksana pengabdian.
3. Diskusi dan tanya jawab yang dilakukan tim pelaksana pengabdian dan peserta pengabdian berjalan dengan lancar dan dapat memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh peserta pengabdian selama ini.

4. Peserta pengabdian yang terdiri dari masyarakat desa, perangkat desa, perwakilan pengurus BPD Desa Tambu, Kecamatan Balaesang serta mahasiswa menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam pelaksanaan pelatihan, terutama pada tahap diskusi dan tanya jawab.
5. Hambatan yang dirasakan pada saat pelaksanaan acara sosialisasi adalah ukuran aula kantor kepala desa tambu yang dijadikan sebagai tempat pelaksanaan pelatihan dirasa agak kecil, sehingga tidak dapat menampung peserta dalam jumlah banyak.
6. Dengan adanya kegiatan pengabdian masyarakat ini telah Terjalin kerjasama antara pihak Desa Tambu dan dosen pelaksana program pengabdian kepada masyarakat khususnya dan Universitas Tadulako pada umumnya.



Gambar 3. Foto Bersama Aparat Desa

KESIMPULAN

Upaya peningkatkan pengetahuan dan ketrampilan bagi masyarakat di Desa Tambu khususnya jajaran kepala desa, sekretaris, ketua RT, RW, ketua adat dan masyarakat. Mengoptimalkan potensi di Desa Tambu dengan perencanaan dan pengelolaan keuangan desa yang baik dan benar dengan tujuan supaya Pemerintah Desa yang mengelola keuangan desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa agar perencanaan anggaran dapat dengan mudah terealisasikan. Pemerintah Desa atau yang disebut juga Pemdes merupakan lembaga pemerintah memiliki peranan penting dalam mengelola keuangan wilayah tingkat desa. Selain pemerintah desa terdapat lembaga lain seperti Badan Perwakilan Desa (BPD).

Melalui kegiatan sosialisasi pengabdian yang dilakukan oleh Mahasiswa MBKM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako, mengharapkan kegiatan tersebut dapat menumbuhkan produktifitas kinerja Pemerintah Desa Tambu dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan Peraturan Daerah saat ini yang tercantum dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa merupakan instrumen baru Dana Desa yang Bersumber dari APBN melalui pengelolaan keuangan dan pembangunan desa yang partisipatif, transparan dan akuntabel.

Tingkat partisipasi masyarakat sekitar 80% yang menghadiri kegiatan dalam rangka sosialisasi pengabdian mengelola keuangan desa dengan sebaik-baiknya, dan sosialisasi ini sebaiknya dilaksanakan secara berencana dan berkesinambungan dalam rangka pendampingan lanjutan di masa yang akan datang.

Kegiatan sosialisasi pengabdian di Desa Tambu tersebut mendapat respon yang positif dari peserta, karena disaat selesai penyaji menyampaikan pemaparannya, ada sesi diskusi dan banyak pertanyaan yang muncul dari peserta, diantaranya yaitu menyangkut tentang pengelolaan aset dan anggarannya yang memadai yang harus didukung oleh keterampilan dan pengetahuan SDM.

Hal ini perlu adanya sosialisasi atau pembinaan secara terus menerus sehingga masyarakat desa lebih paham dengan regulasi yang ada.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terlaksananya kegiatan pengabdian ini tidak terlepas dari kontribusi dan partisipasi berbagai pihak. Pertama-tama penulis ucapkan terimakasih kepada kedua orang tua penulis Bapak Mirsan dan Ibu Masna yang selalu mendukung keputusan penulis dan senantiasa mendoakan penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Mahfudz, MP selaku Rektor Universitas Tadulako;
2. Bapak Dr. M. Ikbal A. SE., Ak., CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako;
3. Bapak Dr. Maskuri Sutomo, SE., M.Si selaku Ketua Jurusan Program studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako;
4. Ibu Harnida Wahyuni Adda, SE., MA., Ph.D selaku Koordinator Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako;
5. Bapak Dr. Muhammad Din, SE., M.Si., Ak., CA selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL);
6. Ibu Dr. Juliana Kadang, SE, MM selaku Ketua Unit MBKM FEB UNTAD dan seluruh Tim MBKM Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Tadulako;
7. Seluruh Tim YGBK yang telah banyak membantu kami, memberikan arahan serta masukkan sehingga kami mampu menyelesaikan program MBKM Bangun Desa Mandiri;
8. Pemerintah Desa Tambu (Kepala Desa dan jajarannya);
9. Seluruh masyarakat Desa Tambu yang telah menerima kami dengan baik;
10. Keluarga besar Rupa Beddu Hamid yang terus mendukung dan mendoakan penulis;

11. Teman-teman Posko Tambu MBKM Membangun Desa mandiri;
12. Keluarga Besar IPMIL Raya Palu, teman-teman Asrama IPMIL Raya Palu dan juga teman-teman Angkatan X IPMIL Raya Palu.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam membantu penulis untuk menyelesaikan laporan akhir ini.

REFERENSI

- Diskhamarzeweny, dkk. (2022). Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.
- Junaidi. (2020). Pendampingan Pengelolaan dan Penyusunan Laporan Keuangan Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ladongi , Kecamatan Malangke , Kabupaten Luwu Utara.
- Ifatul Ambar, Zulaifah, Marwata. (2020). Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Jlumpang, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang).
- M. Thoyib, dkk. Volume 5 nomor 2 (2020). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin).
- Suwarno. (2019). Pengelolaan Keuangan Desa: Perencanaan Sampai Dengan Pertanggungjawaban pada Desa di Kecamatan Cilo.ngok Banyumas.
- Yesi Mutia Basri. Titi Desti Marianti, Rofika. (2021). Pengelolaan Keuangan Desa : Analisis Faktor yang Mempengaruhinya.
- Lukman Pakaya, S.Pd., MSA, Ayu Rakhma Wuryandini, SE., M. (2018). Laporan Pengabdian Masyarakat.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa.
- Zamzami, Dwi Hastuti. (2021). Sosialisasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa dalam Implementasi UU No.06
2022. Tambu. Sosial Mapping.